

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA

¹Ana Andriyana*, ²Sukatni, ³Aulia Rizky Rachmadina, ⁴Bagas Ilham Wibiyanto,
⁵Taufan Adi Kurniawan
^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta,
Jalan Ring Road Utara No 17. Ngringin, Condongcatur, Kec Depok, Kab. Sleman
¹andriyanaana455@gmail.com, ⁵tkurniawan0522068202@stiesbi.ac.id
*Corresponding author: ¹andriyanaana455@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia memberikan dana bantuan pendidikan pada sekolah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 dengan turunan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri dan swasta. Data menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 4% per tahun dari 2017-2022, hingga September 2021 terdapat 52 kasus korupsi dana BOS. Pada tahun 2022 terungkap di Yogyakarta terdapat kasus dana BOS yang menunjukkan penggunaan dana BOS tidak sepenuhnya untuk keperluan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi SDM, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Dana BOS, dan menguji secara empiris pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja Dana BOS terhadap akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan stratified purposive sample method, sampel 37 responden dari 21 sekolah yang kemudian diolah menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan transparansi.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Dana BOS, Implementasi Anggaran, Transparansi

Abstract

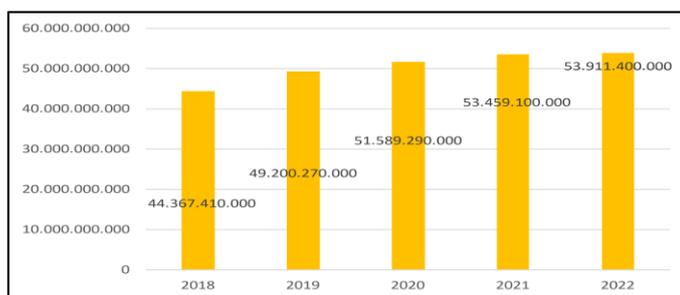
Indonesian government provides educational assistance funds to schools through Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 with derivatives of Permendikbud No. 6 tahun 2021 through School Operational Assistance (BOS) for public and private schools. Data shows an increase of 4% per year from 2017-2022, until September 2021 there were 52 cases of corruption of BOS funds. In 2022, it was revealed in Yogyakarta that there was a case of BOS funds which showed that the use of BOS funds was not entirely for school needs. This study aims to empirically test the influence of HR competence, information technology and internal control systems on the implementation of the BOS Fund performance-based budget, and empirically test the influence of the implementation of the BOS Fund performance-based budget on performance accountability and transparency of BOS fund management. This study uses a non-probability sampling method with a stratified purposive sample method, a sample of 37 respondents from 21 schools which were then processed using Partial Least Square (PLS). The results of the study indicate that HR competency, information technology and internal control systems do not have a positive effect on performance-based budgeting. While performance-based budgeting has an effect on performance accountability and transparency.

Keywords: Performance Accountability, BOS funds, Budget Implementation, Transparency

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 telah memberikan landasan pelaksanaan wajib belajar bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program bantuan dari pemerintah dalam bentuk pendanaan biaya operasional non personalia sekolah ke sekolah negeri dan swasta sebagai wujud dari program wajib belajar. Hal ini dapat meringankan beban biaya orang tua sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan APS pada tahun 2023 mencapai 99,16% di kelompok usia 7-12 tahun, 96,1% di kelompok usia 13-15 tahun, 73,42% di kelompok usia 16-18 tahun, dan 26,85% di kelompok usia 19-23 tahun.

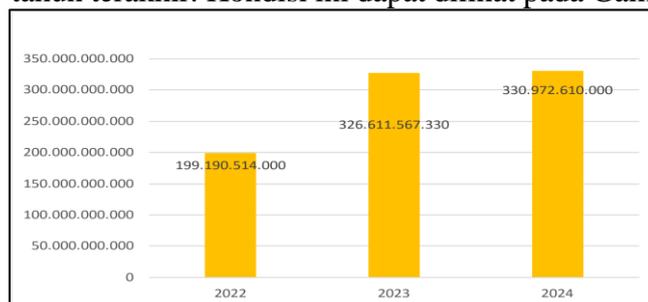
Anggaran Pendidikan untuk kebutuhan BOS selama 2017-2022 mengalami peningkatan sebanyak 4% pertahun (Kusnandar, 2021). Kondisi ini dapat dilihat dari dalam Gambar 1 berikut ini (dalam miliar):



Gambar 1. Data Anggaran Dana BOS

Sumber: Kusnandar, 2021

Total perolehan dana BOS di Wilayah D.I Yogyakarta berdasarkan grafik data berikut pada tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Data gambar Dana BOS D.I Yogyakarta

Sumber: KEMDIKBUD

Pada tahun 2022, terungkap adanya kasus korupsi dana BOS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang melibatkan salah satu SMK Swasta di Sleman. Kepala sekolah dan bendahara mengambil dana BOS dari bank namun dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk keperluan SMK (Subarkah, 2022). *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi pada bidang pendidikan mulai Januari 2016 hingga September 2021 menunjukkan 52 kasus korupsi dana BOS, dengan 71%

kasus melibatkan kepala sekolah. Modus paling umum yang terjadi berupa laporan pertanggungjawaban fiktif, penyalahgunaan dan penggelapan anggaran. Pengelolaan anggaran sekolah yang tidak transparan dan akuntabel menyebabkan maraknya kasus korupsi di sekolah masih sering terjadi (*Indonesia Corruption Watch*, 2021). Kondisi ini bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (48) melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler menjadi dasar penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyulina dan Inapty (2015) menganalisis tentang sistem pengendalian intern terhadap anggaran berbasis kinerja di BLU (Badan Layanan Umum) dengan metode kuantitatif menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penelitian lain oleh Binawati (2015), yang menganalisis antara implementasi anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas sektor publik pada Pemerintah DIY, menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif).

Penelitian tentang implementasi anggaran berbasis kinerja dengan metode kualitatif tentang sistem teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia oleh Danila, Ibrahim dan Abdullah (2019) menunjukkan terdapat pengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Senada dengan hasil tersebut, penelitian oleh Gowasa, Sublihar dan Suriadi (2021) tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan anggaran yang berbasis kinerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara juga menunjukkan terdapat pengaruh positif kompetensi SDM terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan transparansi pelaporan keuangan di SKPD kota Denpasar dengan metode kuantitatif oleh Pebriani, Mareni dan Yuliasuti (2021) menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap transparansi.

Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang mengacu pada akuntabilitas dan transparansi pada anggaran kinerja dana BOS serta masih terbatasnya penelitian metode kuantitatif di Indonesia tentang dana BOS, maka penelitian ini mengkaji fenomena masalah dana BOS di SMA/SMK di Kabupaten Sleman dengan metode kuantitatif menggunakan PLS (*Partial Least Square*) *Structural Equation Model* (SEM). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai variable yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja pada dana BOS di kabupaten Sleman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan variabel implementasi anggaran berbasis kinerja sebagai variabel intervening, dengan kompetensi SDM, teknologi informasi, sistem pengendalian intern sebagai variabel bebas dan akuntabilitas kinerja dan transparansi sebagai variabel terikat.

Kontribusi dari penelitian yaitu untuk memberikan bukti secara empiris ke pemerintah/sekolah terkait faktor yang mendukung implementasi anggaran berbasis kinerja dana BOS terhadap akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan dana BOS. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah mengevaluasi pelaksanaan peraturan pemerintah, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar dalam hal peningkatan layanan pendidikan dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan juknis dana BOS.

KERANGKA TEORI

Kompetensi SDM Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan dari organisasi publik adalah untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga SDM yang ahli dan kompeten menjadi sebuah kunci yang perlu menjadi perhatian dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi, misi serta tujuan organisasi. Kompetensi adalah penguasaan pada bidang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan perilaku yang mengarah pada kinerja yang diikuti dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Gowasa *et al.*, 2021).

Penelitian oleh Gowasa *et al.*, (2021) menunjukkan hasil pelaksanaan kompetensi sudah cukup baik dan terdapat peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Penelitian tersebut mengungkapkan kompetensi SDM secara positif mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. Artinya, kompetensi SDM yang baik maka implementasi sistem anggaran berbasis kinerjanya akan semakin baik (Ratmono & Suryani, 2016). Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: **Hipotesis 1a (H1a)**: Diduga kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Kemajuan dalam sistem teknologi informasi berpeluang tinggi bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan cepat dan akurat. Dengan teknologi informasi yang pesat praktik implementasi anggaran berbasis kinerja bisa mendukung terwujudnya akutabilitas kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, terutama pasal 10 yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah, menetapkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan publik yang berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan daerah.

Penelitian oleh Danila *et al.*, (2019) menunjukan sistem teknologi informasi mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. Jadi semakin baik teknologi informasi yang di gunakan akan semakin baik pula sistem anggaran berbasis kinerjanya (Ratmono & Suryani, 2016). Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini: **Hipotesis 1b (H1b)**: Diduga teknologi informasi berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang saling berhubungan dari berbagai tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf dan pimpinan. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian oleh Wahyulina dan Inapty (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berdampak terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Jadi

semakin baik sistem pengendalin intern yang diterapkan maka akan semakin baik pula sistem anggaran berbasis kinerjanya (Choiriah, 2019). Berikut adalah hidotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

Hipotesis 1c (H1c): Diduga sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Pasal 48 UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait pengelolaan dana BOS melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang juknis BOS, pembuatan RKAS diatur oleh prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler. Namun pada kasusnya, masih maraknya kasus korupsi di sekolah masih sering terjadi hal ini karena pengelolaan dana BOS masih memiliki hambatan yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti bahwa organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas kinerja dan transparansi perlu diwujudkan dalam upaya merespon tingginya tuntutan terkait kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja (Binawati, 2015). Fakto yang berasal dari internal yang memepengaruhi akuntabilitas dana BOS yaitu, kompetensi SDM, kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, kedisiplinan, dan integritas personal (Nurhayati *et al.*, 2023). Di sisi lain, faktor eksternal terdiri dari internet yang memadai, program aplikasi yang mudah digunakan, dan teknologi komputer

Hasil penelitian oleh Binawati (2015) menunjukkan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Jadi dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja yang baik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerjanya (Wardani & Silvia, 2021). Berikut adalah hipotesis yang diajukan:

Hipotesis 2a (H2a): Diduga implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

Aggaran Berbasis Kinerja terhadap Transparansi

Dengan keluarnya PP Nomor 58 tahun 2005, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang menekankan pada pencapaian hasil atau output dari alokasi biaya. Dengan dikelurakan peraturan ini terjadi perubahan sistem dari sistem konvensional ke anggaran berbasis kinerja untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi. Transparansi adalah keterbukaan terhadap semua tindakan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi (Pebriani *et al.*, 2021). Dengan perubahan ini, diharapkan transparansi dalam pelaporan keuangan meningkat, dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cara pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah.

Penelitian oleh Pebriani *et al.*, (2021) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berdampak baik terhadap transparansi pelaporan. Artinya, transparansi pelaporan akan meningkat apabila penerapan sistem anggaran berbasis kinerja baik. Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan :

Hipotesis 2b (H2b): Diduga implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap transparan.

Berikut ini tersaji pada Gambar 3, model penelitian ini.



Gambar 3. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Sekolah di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 172 Sekolah. Populasi yang tidak lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasi (Arikunto, 2016). Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 20 sekolah (12%) sekolah berdasarkan jumlah nominal dana BOS terbanyak yang diterima oleh sekolah karena Kabupaten Sleman merupakan penerima dana BOS terbanyak di DI Yogyakarta dan sempat terdapat kasus penyalahgunaan dana BOS (Subarkah, 2022). Metode pengumpulan sampel data menggunakan *non probability sampling* dengan *stratified purposive sample method*. Responden penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana BOS seperti kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, wali murid dan guru. Peneliti akan mengambil sampel sekolah di Kabupaten Sleman dengan kriteria pertama: pegawai sekolah di Kabupaten Sleman yang menjabat minimal 1 (satu) tahun. Kriteria kedua: responden terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Responden dengan pengalaman sebagai pengelola dana BOS minimal satu tahun telah mengetahui kendala yang ada, regulasi dan permasalahan lainnya. Variabel penelitian diukur menggunakan indikator-indikator tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator
Kompetensi SDM (X1)	Kemampuan, ketrampilan, pemahaman, pengetahuan (Solihantara, 2021)
Teknologi Informasi (X2)	Jumlah komputer yang layak, penggunaan jaringan internet, komputerisasi proses akuntansi, dan penggunaan software yang sesuai undang undang (Solihantara, 2021)
Sistem Pengendalian Intern (X3)	Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi (Solihantara, 2021)
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Z1)	Perbaikan kinerja program, peningkatan akuntabilitas, pengurangan pelayanan atau program tumpang tindih, peningkatan koordinasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, perubahan tingkat alokasi anggaran, dan peningkatan efektivitas (Binawati, 2015)
Akuntabilitas Kinerja (Y1)	Tingkat para pegawai bertanggungjawab untuk mencapai hasil organisasi (Binawati, 2015)
Transparansi (Y2)	Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen (Dewi & Pratiwi, 2024)

Pengambilan data kuantitatif pada penelitian menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis penelitian secara kuantitatif dengan PLS (*Partial Least Square*) dari *Structural Equation Model* (SEM) yang berbasis varians untuk menyelesaikan regresi berganda

untuk permasalahan seperti ukuran sampel yang kecil atau adanya data yang hilang (*missing values*) dan multikolinearitas (Hamid, 2019). Dengan alat statistik PLS analisis yang digunakan meliputi, (1) Pengujian evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) yaitu untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument. Adapun tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu *discriminant validity*, *covergent validity*, dan *composite reliability*; (2) Pengujian evaluasi model structural (*Inner Model*) mencakup nilai signifikansi setiap koefisien jalur yang menyatakan apakah ada signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Adapun tiga kriteria untuk menilai inner model yaitu *r-square*, *f-square*, *goodness of fit* dan *Q² Predictive Relevance*; (3) Uji Hipotesis (*Bootstrapping*) untuk menilai signifikan pengaruh antara variabel, dengan prosedur *bootstrap* yaitu seluruh sampel asli untuk melakukan resampling kembali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah ke atas atau sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Kriteria tempat yang dipilih peneliti adalah sekolah berdasarkan jumlah nominal dana BOS terbanyak yang diterima oleh sekolah dengan total sampel 20 sekolah dari 172 sekolah. Penyebaran data dilakukan dari 28 Mei 2024 hingga 6 Juni 2024. Perizinan riset dilakukan ke 31 sekolah dengan 26 sekolah yang memperoleh perizinan dan kuisisioner bisa disebar. Terdapat 4 sekolah menolak untuk mengembalikan kuisisioner dan 6 sekolah menolak pada saat perizinan riset. Sehingga total sampel sekolah yang dapat diterima sebanyak 21 sekolah, dengan 1-3 kuisisioner untuk dibagikan kepada para responden yaitu pengelola dana BOS. Pengumpulan data responden dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Terdapat 37 kuisisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini, dari total 53 kuisisioner yang disebar.

Analisis Data Kuantitatif Karakteristik Responden

Tabel 2 menunjukkan data karakteristik responden untuk penelitian ini yang sesuai dengan kriteria sampel.

Statistik Deskriptif

Nilai *mean* (rata-rata), standar deviasi, minimum, dan maksimum digunakan dalam statistik deskriptif untuk memberikan gambaran singkat tentang variabel-variabel penelitian. Tabel 3 menunjukkan rincian hasil dari pengujian statistik deskriptif.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer Model adalah model untuk menguji validitas dan reliabilitas setiap konstruk penelitian. Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam pengujian *outer model* yaitu *discriminant validity*, *covergent validity*, dan *composite reliability*.

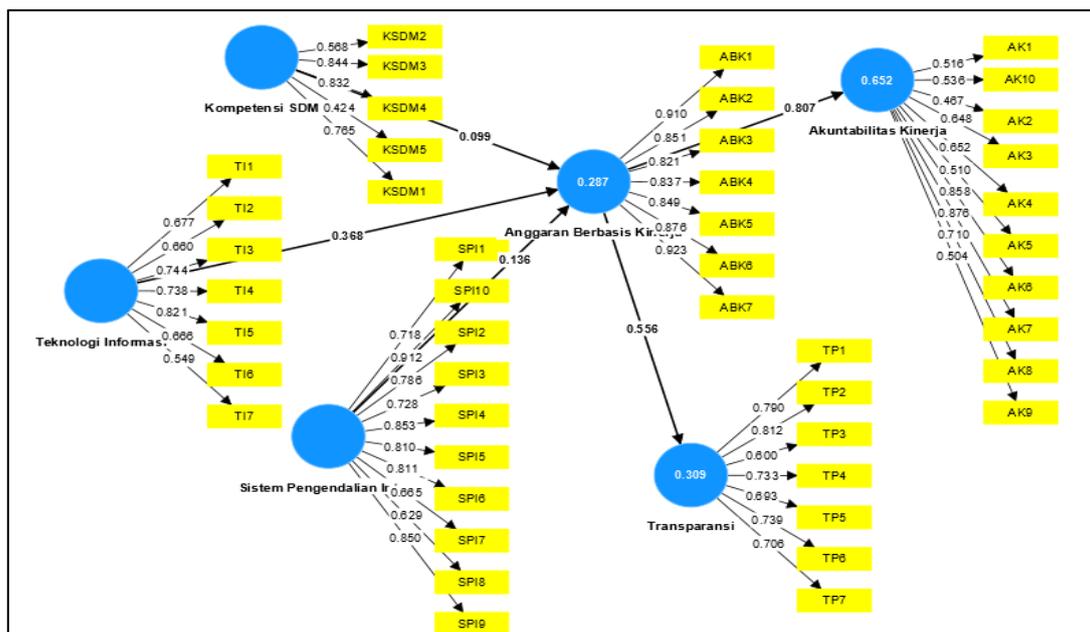
Untuk memenuhi kriteria persyaratan maka nilai outer model $\geq 0,5$. Namun dalam beberapa kasus nilai *outer loading* $\geq 0,4$ dapat dipertahankan (Hartono, & Abdillah, 2015). Gambar 4 menunjukkan hasil pengujian *outer model* dengan hasil pengujian *outer model* pada semua konstruk penelitian telah $\geq 0,4$, yang artinya bahwa semua variabel telah memenuhi kriteria persyaratan kecukupan model atau *covergent validity*.

Tabel 2. Tabel Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	8	22%
Wanita	29	78%
Jumlah	37	100%
Jenis Sekolah		
Negeri	10	27%
Swasta	27	73%
Jumlah	37	100%
Usia		
Usia 20 - 30 Tahun	8	22%
Usia 31 - 40 Tahun	10	27%
Usia 41 - 50 Tahun	10	27%
Usia 51 - 56 Tahun	6	16%
Lainnya	3	8%
Jumlah	37	100%
Masa Kerja		
Kurang dari 1 Tahun	0	0%
1 - 5 Tahun	29	78%
6 - 10 Tahun	4	11%
11 - 15 Tahun	4	11%
Jumlah	37	100%
Pendidikan Terakhir		
SLTA/ yang sederajat	8	22%
D3	5	14%
S1	21	57%
S2	3	8%
Jumlah	37	100%

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimal
Kompetensi SDM (KSDM)	3,26	0,37	2,40	4
Teknologi Informasi (TI)	4,29	0,69	3,29	5
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	3,00	0,30	3,10	5
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3,91	0,59	2,00	5
Akuntabilitas Kinerja (AK)	4,19	0,39	3,30	5
Transparansi (Tr)	4,05	0,70	2,43	5



Gambar 4. Output Outer Model Smartpls Tahun 2024

Tabel 4. Hasil Pengolahan Uji Validitas dan Reliabilitas PLS

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>AVE</i>
KSDM	0,737	0,784	0,499
TI	0,828	0,812	0,487
SPI	0,928	0,949	0,610
ABK	0,945	0,947	0,753
AK	0,857	0,905	0,414
Tr	0,856	0,857	0,529

Pengujian selanjutnya adalah *convergent validity* melalui AVE (*Average Variance Extracted*) atau *Communality* $\geq 0,5$ (Hartono, Jogiyanto dan Abdillah, 2015). Nilai AVE $\geq 0,4$ dapat dipertahankan jika nilai *Composite Reliability* $\geq 0,6$. Tabel 4 menunjukkan hasil pengolahan data dengan hasil semua konstruk memiliki nilai AVE $\geq 0,4$ dan *Composite Reliability* $\geq 0,6$ artinya bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki *convergent validity* yang baik.

Kriteria persyaratan untuk pengujian *discriminant validity* dengan melihat nilai *cross loading*. Tabel 5 menunjukkan hasil analisis *cross loading* pada setiap konstruk yang dituju telah mempunyai nilai lebih tinggi dari *cross loading* variabel lain yang berarti penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik.

Tabel 5. Hasil Pengolahan *Cross Loading* PLS

	KSDM	SPI	TI	ABK	AK	Tr
KSDM	0,687	0,390	0,406	0,240	0,407	0,240
TI	0,390	0,488	0,694	0,305	0,375	0,270
SPI	0,411	0,776	0,524	0,326	0,476	0,306
ABK	0,320	0,381	0,442	0,867	0,697	0,479
AK	0,435	0,469	0,410	0,428	0,628	0,387
Tr	0,279	0,328	0,292	0,373	0,439	0,725

Model Struktural atau *Inner Model*

Pengujian *inner model* atau model struktural pada penelitian ini menggunakan *r-square*, *f-square*, *goodness of fit* dan *Q² Predictive Relevance* untuk mengetahui hubungan antar variabel dan nilai signifikansi dalam model penelitian. Nilai *r-square* berguna untuk menilai pengaruh substantif variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen.

Tabel 6. Pengolahan Data R-Square PLS

	<i>R-square</i>
ABK	0,287
AK	0,652
Tr	0,309

Tabel 6 menunjukkan *r-square* memiliki pengaruh variabel kompetensi SDM (KSDM), teknologi informasi (TI), sistem pengendalian intern (SPI) berdampak terhadap anggaran berbasis kinerja (ABK) sebesar 0,287. Artinya, variabel *eksogen* memiliki pengaruh lemah terhadap anggaran berbasis kinerja (ABK). Selanjutnya, nilai *r-square* memiliki pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja (ABK) berdampak terhadap akuntabilitas kinerja (AK) sebesar 0,652 menunjukkan variabel intervening memiliki pengaruh moderat terhadap akuntabilitas kinerja (AK). Nilai *r-square* pada pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja (ABK) berdampak terhadap transparansi (Tr) sebesar 30,9% menunjukkan bahwa variabel intervening memiliki pengaruh lemah terhadap transparansi (Tr).

Tabel 7. Pengolahan Data F-Square PLS

	AK	ABK	Tr
ABK	1,87		0,44 7
KSDM		0,009	
TI		0,093	
SPI		0,013	

Pengujian *f-square* bertujuan untuk menilai hubungan dan besaran pengaruh antar variabel. Pengukuran *f-square* pada Tabel 7 menunjukkan nilai besarnya pengaruh variabel kompetensi SDM (KSDM) terhadap anggaran berbasis kinerja (ABK) sebesar $0,009 \leq 0,02$ memberikan pengaruh yang rendah. Variabel teknologi informasi (TI) terhadap anggaran berbasis kinerja (ABK) sebesar $0,093 \leq 0,15$ menunjukkan pengaruh moderat. Variabel anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap akuntabilitas kinerja (AK) sebesar $1,87 \geq 0,35$ menunjukkan pengaruh yang tinggi. Variabel anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap transparansi (Tr) $0,447 \geq 0,35$ menunjukkan pengaruh relatif tinggi.

Nilai *goodness of fit* dapat diketahui dari hasil SRMR. Kriteria yang dipenuhi adalah nilai $SMRM \leq 0,08$ maka, model yang dibangun dianggap sesuai dengan data dan dapat diandalkan untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan oleh peneliti. Pada tabel 8 menunjukkan nilai $SMRM \geq 0,08$ yang menunjukkan bahwa nilai ini dianggap kurang sesuai dengan data sehingga perlu dilakukan perbaikan model.

Tabel 8. Pengolahan Data Goodness of Fit Melalui SRMR

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.133	0.147
d_ULS	19.844	24.535
d_G	n/a	n/a
Chi-square	∞	∞
NFI	n/a	n/a

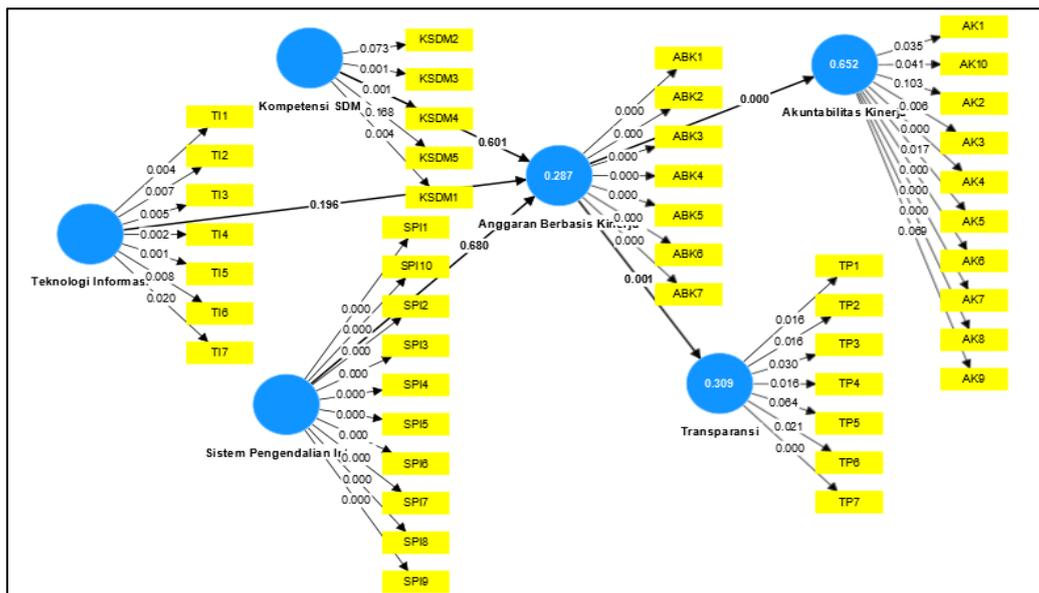
Tabel 9. Pengolahan Data Q^2 Predictive Relevance.

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
KSDM	222.000	222.000	
TI	296.000	296.000	
SPI	370.000	370.000	
ABK	259.000	206.345	0,203
AK	407.000	343.555	0,156
Tr	259.000	245.145	0,053

Tabel 9 menunjukkan uji ketepatan prediksi melalui pengujian Q^2 Predictive Relevance atau Q -square dengan kriteria Q^2 mempunyai nilai yang baik jika nilai $Q^2 > 0$. Tabel 9 menunjukkan variabel anggaran berbasis kinerja (ABK), akuntabilitas kinerja (AK) dan transparansi (Tr) mempunyai nilai $Q^2 \geq 0$ yang berarti model penelitian yang digunakan memiliki relevansi prediktif yang baik.

Pengujian Hipotesis

Kriteria persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengujian hipotesis yaitu apabila nilai signifikan t -statistic $\geq 1,96$ atau nilai p -value $\leq 0,05$ pada taraf signifikansi (α) 5% artinya hipotesis diterima (H_a diterima dan H_o ditolak). Pengujian hipotesis menggunakan diagram *Bootstrapping* dalam PLS bisa dilihat di Gambar 5.



Gambar 5. Pengujian Hipotesis - Diagram Bootstrapping

Tabel 10 menunjukkan hasil analisis model pengukuran (analisis jalur) dengan menggunakan iterasi algoritma PLS.

Tabel 10. Output pengujian hipotesis

	Original Sample	T statistik	P Values	Hasil
KSDM terhadap ABK	0,099	0,522	0,601	Tidak diterima
TI terhadap ABK	0,368	1,292	0,196	Tidak diterima
SPI terhadap ABK	0,136	0,413	0,680	Tidak diterima
ABK terhadap AK	0,807	14,648	0,000	Didukung
ABK terhadap Tr	0,556	3,321	0,001	Didukung

H1a: Diduga kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

Nilai t-statistik dari H1a dapat dilihat pada hasil pengujian *bootstrapping* di tabel 10 yaitu sebesar $0,522 \leq 1,64$ (T-tabel). Artinya, hipotesis 1a dalam penelitian ini tidak diterima karena hipotesis tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian oleh Ratmono dan Suryani (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif kualitas SDM terhadap anggaran berbasis kinerja. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa indikator perilaku mempunyai skor tertinggi dalam kuesioner kemudian diikuti dengan indikator keahlian sementara indikator pengetahuan mendapatkan skor paling rendah dari ketiganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai perilaku yang bagus dalam pengelolaan dana BOS, namun sayangnya hal tersebut tidak selaras dengan pengetahuan dan keahlian SDM.

H1b: Diduga teknologi informasi berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

Nilai t-statistik dari H1b dapat dilihat pada hasil pengujian *bootstrapping* di tabel 10 yaitu sebesar $1,292 \leq 1,64$ (T-tabel). Artinya, hipotesis 1b dalam penelitian ini tidak diterima karena hipotesis tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian oleh Ratmono dan Suryani (2016) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif teknologi informasi terhadap anggaran berbasis kinerja. Penelitian oleh Mantiri, Rumat, dan Kawung, (2019) menjelaskan betapa pentingnya kondisi layanan internet yang layak serta jadwal pemeliharaan atau perbaikan perangkat teknologi informasi secara berkala untuk optimalisasi kinerja pegawai. Jadwal pemeliharaan atau perbaikan teknologi informasi secara rutin dan berkala dapat meminimalisir adanya gangguan, kendala dan permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja.

H1c: Sistem Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja

Nilai t-statistik dari H1c dapat dilihat pada hasil pengujian *bootstrapping* di tabel 10 yaitu sebesar $0,413 \leq 1,64$ (T-tabel). Artinya, hipotesis 1c dalam penelitian ini tidak diterima karena hipotesis tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian oleh Choiriah (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap disiplin anggaran hal ini karena terdapat beberapa kendala berdasarkan kondisi di lapangan seperti kendala nominal dana

yang besar namun pos serapan masih kurang dan durasi waktu dari pencarian dana hingga pelaporan relatif sangat singkat.

H2a: Diduga Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Tabel 10 hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja menunjukkan nilai t-statistik sebesar 14,648 yang berarti telah memenuhi kriteria $\geq 1,64$ (T-tabel) dengan nilai original sample 0,807. Hal tersebut menunjukkan H2a pada penelitian ini dapat diterima. H2a dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian oleh Wardani dan Silvia, (2021) yang menyatakan terdapat pengaruh positif implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan akuntabilitas, masyarakat akan lebih mudah mendapat informasi terkait pengelolaan dana sehingga sekolah dapat dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sekolah, terutama pengelolaan dana BOS (Safitri & Binawati, 2024).

H2b: Diduga Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap Transparansi

Berdasarkan tabel 10 hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap transparansi menunjukkan nilai T-statistik sebesar 3,321 dan telah memenuhi kriteria $\geq 1,64$ (T-tabel) dengan nilai original sample 0,556. Hal tersebut menunjukkan H1a pada penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian oleh Pebriani et al., (2021) yang menyatakan terdapat pengaruh positif anggaran berbasis kinerja transparansi. Anggaran berbasis kinerja meningkatkan budaya kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Ini mendorong pengelola untuk bekerja lebih baik dan lebih keras agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian yang baik bagi pengelola. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS mencakup mudahnya aksesibilitas informasi baik di internet maupun di papan informasi (Safitri & Binawati, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh hubungan yang signifikan antara variabel kompetensi SDM terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja hal ini karena pengelola Dana BOS di SMA atau sederajat Sleman mayoritas mempunyai inisiatif untuk berusaha memahami dan mampu membuat anggaran dan laporan meskipun dengan terdapat beberapa keterbatasan seperti kurangnya pelatihan ataupun tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari oleh SDM sebelumnya, berkaitan dengan hal ini ada baiknya jika dari dinas memberikan pelatihan, pengenalan atau pendampingan dalam pengelolaan dana BOS supaya SDM mempunyai kompetensi yang memadai. Beberapa sekolah sempat kekurangan personil yang bertugas sebagai pengelola dana BOS sehingga beban kerja menjadi terlalu berat namun setelah adanya persetujuan untuk menambah personil ke kepala sekolah sebagai pengelola dana BOS maka beban kerja masing-masing pengelola berkurang dan SDM bisa lebih optimal ketika bekerja, berkaitan dengan kendala tersebut ada baiknya jika dinas melakukan pemetaan personel dan memberikan jumlah personel yang cukup sehingga pengelola dana BOS dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Variabel teknologi informasi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh hubungan yang signifikan antara penggunaan teknologi informasi terhadap implementasi

anggaran berbasis kinerja. Hasil tersebut karena adanya keterbatasan pada perangkat keras seperti umur komputer yang telah melampaui umur ekonomis sehingga sering terjadi *error* atau lambat ketika dioperasikan, berkaitan dengan hal tersebut ada baiknya jika pihak sekolah atau dinas terkait untuk mengalokasikan anggaran untuk perangkat penunjang, mengingat masa pengajuan anggaran dan masa pencairan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak menjadi penghambat dalam pengelolaan dana BOS. Kurangnya perawatan pada perangkat keras menyebabkan waktu yang lebih lama dalam pelaporannya sehingga berdampak pada kinerja pengelola kurang optimal, berkaitan dengan hal tersebut maka lebih baik pihak sekolah atau dinas terkait mengalokasikan anggaran biaya untuk perawatan dan menggolongkan perawatan mayor dan minor untuk mempermudah identifikasi permasalahan.

Variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala, berdasarkan kondisi di lapangan seperti kendala nominal dana yang besar namun pos serapan masih kurang dan durasi waktu dari pencarian dana hingga pelaporan yang relatif sangat singkat, apabila hal tersebut terjadi dan berulang maka pihak sekolah atau dinas terkait bisa membuat *time frame* mulai dari perencanaan hingga pelaporan sehingga dapat menjadi dasar untuk masukan dan perbaikan bagi dinas terkait dalam pencairan dana hingga pelaporan.

Implementasi anggaran berbasis kinerja sebagai variabel intervening menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut berarti implementasi anggaran berbasis kinerja pengelolaan Dana BOS yang baik akan mendorong akuntabilitas kinerja yang semakin baik. Akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa pengelola mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengelola dana untuk berbagai pemangku kepentingan. Semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja pengelolaan Dana BOS yang baik akan semakin mendorong transparansi yang semakin baik. Transparansi yang baik menunjukkan berjalannya elemen pengendalian yang baik dalam pengelolaan dana karena berbagai pemangku kepentingan juga ikut berperan dalam melaksanakan pengendalian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja yang baik akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi, namun variabel SDM, teknologi informasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja. Beberapa kendala dalam hal operasional dan teknis di lapangan yang menyebabkan anggaran berbasis kinerja tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini menjadi suatu masukan dalam pengelolaan dana BOS yang menunjukkan perlunya dukungan seperti optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, optimalisasi perangkat dan jaringan untuk teknologi informasi, dan bentuk pengendalian internal yang memadai sehingga anggaran berbasis kinerja dapat berjalan optimal dan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sleman mempunyai transparansi dan akuntabilitas kinerja yang baik.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) supaya memperoleh hasil pemahaman yang lebih luas dan dapat menangkap fenomenal lebih jelas. Sampel penelitian ini terbatas pada pengelola Dana BOS pada SMA atau sederajat yang berada di Kabupaten Sleman, penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada pengelola Dana BOS SMA atau sederajat di seluruh Indonesia. Penggunaan indikator yang lebih spesifik pada penelitian selanjutnya terutama untuk variabel kompetensi SDM

seperti kemampuan untuk melakukan evaluasi, pengukuran dan analisis data terhadap kinerja dalam memahami konsep anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka partisipasi sekolah (APS) menurut provinsi 2021-2023*. Retrieved from: <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MzAxIzI=/angka-partisipasi-sekolah--a-p-s--.html>.
- Binawati, E. (2015). Implementasi anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas sektor publik studi pada Pemerintah DIY. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*, 18(1), 1-19. doi.org: 10.35591/wahana.v18i1.98
- Choiriah, S. (2019). Effectiveness of internal control, good governance, and ethics on budgetary discipline. *Scholars Bulletin*, 05(12), 815–822. doi.org:10.36348/sb.2019.v05i12.017
- Danila, O., Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2019). Analisis determinan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupeten (SKPK) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 82–94. doi.org: 10.24815/jped.v4i1.10925
- Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Pengaruh akuntabilitas, pengawasan dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Mojosongo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 456-463. doi.org: 10.53088/jikab.v3i1.93
- Gowasa, L., Subhilhar, S., & Suriadi, A. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi anggaran yang berbasis kinerja. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 7(2), 54-60. doi.org: 10.56015/governance.v7i2.25
- Hamid, R. S. (2019). *Structural equational modeling (SEM) berbasis varian*. Jakarta Pusat: PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hartono, J. & Abdillah, W. (2015). *Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta: BPF E.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidika: Pendidikan di tengah kepongangan korupsi*. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepongangan-korupsi>.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Anggaran BOS, BOP PAUD, dan BOP pendidikan kesetaraan (2016-2022)*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/5937661729afa8f/dana-bos-meningkat-08-menjadi-rp-5391-triliun-pada-2022>.
- Mantiri, R., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi pegawai dan teknologi informasi terhadap kinerja anggaran pada Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 67–85. doi.org: 10.35794/jpekd.19899.19.7.2018
- Nurhayati, Arifuddin, Akib, M., Suriadi, L. O., Natsir, M., & Indrijawati, A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Progres Ekonomi*

- Pembangunan (JPEP)*, 8(22), 38–51.
- Pebriani, NN, Kepramareni, P., & Yuliasuti, IAN (2021). Pengaruh tekanan eksternal ketidakpastian lingkungan komitmen manajemen dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1 (6), 2131-2140.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 pada Pasal 10 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Ratmono, D., & Suryani, R. (2016). Antecedent and consequence of successful implementation of *performance-based budgeting* in local government. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 14-26. doi.org: 10.20885/jaai.vol20.iss1.art2
- Safitri, F. R., & Binawati, E. (2024). Good School Governance (GSG) on the management of School Operational Assistance (SOA) funds at Bhaktikarya State Elementary School, Sleman, Yogyakarta. *International Students' Conference on Accounting & Business*, 3(19), 1–12.
- Sekretariat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2024). *Laporan penyaluran*. Retrieved from: <https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran>.
- Solihantara, R. (2021). *Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan* (Undergraduate thesis). STIE Malangkecewara. Retrieved from <https://repository.stie-mce.ac.id/1344/>
- Subarkah, L. (2022). *4 tahun korupsi BOS nyaris Rp300 Juta, kepala sekolah dan bendahara SMK di Sleman Ditahan*. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/07/512/1114008/4-tahun-korupsi-bos-nyaris-rp300-juta-kepala-sekolah-dan-bendahara-smk-di-sleman>
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan.
- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Wahyulina, S., & Inapty, B. A. (2015). Pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian intern terhadap anggaran berbasis kinerja pada BLU Universitas Mataram. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 1(2), 165-189. doi.org: 10.26486/jramb.v1i2.203
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1), 47–56. doi.org:10.35968/jbau.v6i1.625
- Yulyanti, Y., Rakib, M., & Rahman, N. (2022). Pengaruh aplikasi rencana kerja anggaran sekolah terhadap akuntabilitas dan transparansi dana BOS. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 6 (1), 251-259. doi.org: 10.33578/pjr.v6i1.8673